

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUDHI SUWANTO**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **857443**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.295.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/110 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 392.7 m2/180 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 945.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 167.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
3. MOBIL, HONDA MOBILIO TYPE S Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 82.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 14.348.179**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 1.558.348.179**III. HUTANG** Rp. 330.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.228.348.179

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.